



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

---

# **Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI**

**KLIPING  
BERITA MEDIA CETAK  
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

---

**HARI SENIN, 8 APRIL 2013**



DAFTAR ISI

Infrastruktur .....	1
Jembatan Selat Sunda .....	2
Pelabuhan .....	3
Jalan Tol .....	4
Blok Mahakam .....	5



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:



POSITIF (+)



NETRAL



NEGATIF (+)

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☐ Jan ☐ Feb ☐ Mar ☒ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☒ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- .....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Infrastruktur Pengurai Kemacetan	- Proyek pembangunan jalan layang non-tol Kampung Melayu-Tanah Abang sepanjang 3,44 km ini dibangun untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan tersebut					

### Infrastruktur Pengurai Kemacetan



**Proyek** pembangunan jalan layang non-tol Kampung Melayu-Tanah Abang difoto dari gedung Ciputra World Jakarta 1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/4). Infrastruktur sepanjang 3,44 kilometer ini dibangun untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan tersebut.



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos
- ☐ Lain-lain, .....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
SBY Berharap Ground Breaking 2014	<div>- Pemerintah tidak bisa membangun pemerintah tidak bisa membangun sendiri JSS akibat keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa dibiayai dari APBN</div> <div>- Presiden meminta kementerian terkait untuk menindaklanjuti dan menjemput bola</div> <div>- Presiden meminta Menteri Keuangan segera menyusun kebijakan dan mekanisme insentif yang menarik serta return yang memadai</div>	2014				

### ► PROYEK JEMBATAN SELAT SUNDA

## SBY Berharap *Ground Breaking* 2014

Arief Budisusilo  
arief.budisusilo@bisnis.co.id

JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan proyek Jembatan Selat Sunda akan dilanjutkan. Pelaksanaan proyek itu atau *ground breaking* diharapkan dapat dimulai pada 2014.

Menurut Presiden Yudhoyono, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) merupakan ide yang bagus. “Konektivitas ekonomi Jawa-Sumatra akan sangat baik,” ujarnya saat memberikan penjelasan kepada para pemimpin redaksi media sesuai jamuan makan malam di kediaman Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Sabtu (6/4).

Namun, Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak bisa membangun sendiri JSS akibat keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa dibiayai dari APBN. “Saya maunya jangan pakai APBN. Serahkan pada swasta dengan konsesi mengembangkan Banten dan Lampung,” katanya.

Menurutnya, dana APBN hanya

digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. “*Policy* saya, hanya infrastruktur dasar yang memakai APBN, sedangkan yang sifatnya komersial diserahkan ke swasta. Bisa *public private partnership* atau mekanisme lain.”

#### KONSESI

Konsesi yang dimaksud Presiden tersebut diperlukan agar proyek JSS menarik secara bisnis, karena akan ada dua area yang bertumbuh yakni Lampung dan Banten. “Selain itu, di tengah lokasi proyek ada pulau sebagai *rest area* sekaligus kawasan wisata. Kalau dua area di Banten dan Lampung tumbuh, *kan cucuk* [ada *benefit*] membangun jembatan itu,” tutur Yudhoyono.

Kalaupun megaprojek ini diserahkan kepada BUMN, menurut Presiden, tidak mungkin perusahaan milik negara dapat berjalan sendiri, namun harus menggandeng swasta dan partner, entah dari Korea atau Tiongkok. “Jadi dari dalam negeri ada BUMN yang bekerja sama dengan swasta, dan secara teknis *feasible* serta tidak

mengganggu APBN, maka *cucuk* [membangun jembatan itu],” jelasnya.

Penjelasan Presiden tersebut dikemukakan sehubungan dengan ketidakjelasan atas proyek JSS menyusul perbedaan pendapat di kalangan menteri kabinet. Proyek yang diprakarsai Tommy Winata, pengusaha dari Artha Graha Network, itu tidak terdengar gaungnya belakangan ini.

Yudhoyono yakin manfaat jangka panjang Jembatan Selat Sunda sangat besar. Oleh karena itu, Presiden meminta kementerian terkait untuk menindaklanjuti dan menjemput bola. “Jadi buka saja secara transparan dan akuntabel, lalu dilakukan *beauty contest* untuk mencari mitra dari luar. Mudah-mudahan pada 2014 bisa *ground breaking*,” katanya.

Untuk itu, dia meminta Menteri Keuangan segera menyusun kebijakan dan mekanisme insentif yang menarik serta *return* yang memadai.

“Kalau *fiscal policy* proinvestasi, tentu ekonomi kita akan lebih baik,” jelas Kepala Negara. ☐





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Kisruh Pelabuhan BPK Minta Penjelasan	<div><div>- PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) menutup Pelabuhan Dermaga Karya Citra Nusantara (KCN) di Marunda, Jakarta Utara, sejak 21 Maret 2013 sehingga kegiatan bongkar muat terhenti</div><div>- Dirut PT. KBN, Sattar menjelaskan, pihaknya tidak mengizinkan perngoperasian dermaga tersebut karena adanya beberapa ketidakjelasan dalam kerja sama antara PT.KBN dan PT. KTU yang membentuk perusahaan patungan, yakni, PT. KCN yang mengelola dermaga itu</div></div>				<div><div>- PT. Kawasan Berikat Nusantara</div><div>- PT. Karya Teknik Utama</div></div>	

KISRUH PELABUHAN

BPK Minta Penjelasan

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan meminta Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba memaparkan permasalahan yang dihadapi badan usaha milik negara itu terkait kekisruhan seputar pengoperasian Pelabuhan Karya Citra Nusantara di Marunda, Jakarta Utara.

Sattar, Minggu (7/4), di Jakarta, membenarkan adanya permintaan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu. "Ya, saya menghargai permintaan tersebut dan saya siap menjelaskan duduk permasalahannya supaya semuanya jelas. Minggu depan saya akan memaparkan persoalan yang kami hadapi," ujarnya saat dikonfirmasi soal permintaan BPK itu. Sattar menjabat direktur utama November 2012.

Sebagaimana diberitakan Kompas, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) menutup Pelabuhan Dermaga Karya Citra Nusantara (KCN) di Marunda, Jakarta Utara, sejak 21 Maret 2013 sehingga kegiatan bongkar muat terhenti. Terkait penutupan itu, Kementerian Perhubungan meminta agar Pelabuhan Dermaga KCN di Marunda dibuka lagi karena merupakan pelabuhan umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh publik.

Penutupan dermaga yang biasa

dipakai untuk bongkar muat hasil tambang dan perkebunan ini dilakukan PT KBN selaku salah satu pemilik Pelabuhan Dermaga KCN. "Pelabuhan ini dimiliki oleh PT KBN dan PT Karya Teknik Utama (KTU). Rupanya terjadi konflik internal di antara mereka, lalu Direktur Utama PT KBN memutuskan menutup pelabuhan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit.

Sattar menjelaskan, pihaknya tidak mengizinkan pengoperasian pelabuhan dermaga tersebut karena adanya beberapa ketidakjelasan dalam kerja sama antara PT KBN dan PT KTU yang membentuk perusahaan patungan, yakni PT KCN, yang mengelola dermaga itu.

"Saya baru menjadi direktur utama pada November 2012. Saya melihat banyak ketidakjelasan dalam kerja sama ini sehingga saya tidak mengizinkan Pelabuhan Dermaga KCN dioperasikan. Kalau saya membiarkan dioperasikan, berarti melakukan pembiaran, saya terlibat sesuatu yang salah. Ini yang saya cegah supaya tata kelola perusahaan milik negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berjalan baik," kata Sattar, mantan Direktur Utama PT Semen Tonasa.

PT KCN adalah perusahaan

patungan antara PT KBN (15 persen kepemilikan) dan PT KTU (85 persen). Sementara saham PT KBN dimiliki 75 persen oleh Pemerintah RI dan 25 persen oleh Pemprov DKI. PT KTU merupakan perusahaan swasta di bidang industri perkapalan.

Menurut Sattar, hal paling krusial adalah ketidaktransparanan KTU sebagai mitra. Pihak KBN sampai saat ini tidak tahu berapa besar nilai rupiah dari nilai kepemilikan saham 15 persen KBN pada KCN. Oleh karena itu, Direktur Utama KBN meminta PricewaterhouseCooper mengaudit forensik keuangan untuk mengetahui nilai pembangunan Pelabuhan Dermaga KCN yang tiba-tiba hendak dioperasikan itu.

Kecuali audit keuangan tersebut, pihak KBN juga meminta sejumlah pengacara atau penasihat hukum untuk melakukan audit legalitas dari kerja sama KBN dan KTU, berikut izin-izin yang dibutuhkan KCN untuk mengoperasikan pelabuhan dermaga tersebut.

"Kalau semuanya itu sudah jelas, segera kita izinkan dioperasikan. Sepanjang tidak jelas, saya tidak mau membiarkan sesuatu yang salah berlangsung begitu saja. Itu namanya saya terlibat dalam sesuatu yang salah," katanya tegas. (\*/PPG)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

## Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input checked="" type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

- ☒ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jalan Tol Hutama Prasarana Dapat Bridging Rp.720 miliar	- Hutama karya menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 60% - Hutama karya menargetkan ground breaking ruas tol Medan-Binjai dapat dilakukan pada akhir semester I/2013			Rp. 720 miliar	PT. Hutama Prasarana Nusantara	

### JALAN TOL

## Hutama Prasarana Dapat Bridging Rp720 Miliar

JAKARTA—PT Hutama Karya akan memberikan dana talangan (*bridging*) Rp720 miliar kepada anak perusahaannya, PT Hutama Prasarana Nusantara, yang akan menggarap jalan tol Medan-Binjai, Sumatra Utara sepanjang 16 kilometer.

Dimas Novita S.  
redaksi@bisnis.com.id

Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Ari Widiyartoro mengatakan saat ini pembentukan anak usaha untuk Medan-Binjai sudah mencapai tahap perizinan komersial.

"Setelah keluar izinnya maka ekuitas dari konsorsium sudah harus disetor," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Senin (8/4).

Adapun komposisi saham konsorsium tersebut, lanjutnya, Hutama Karya menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 60%, sementara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, III, dan IV, serta perusahaan daerah Sumut masing-masing menguasai 10% saham.

Dia menyampaikan untuk modal awal anak perusahaan tersebut, PT Hutama Prasarana Nusantara akan mendapatkan pinjaman awal dari induk perusahaan.

Seperti yang diketahui, sumber permodalan investasi tol bernilai Rp4 triliun tersebut, 30% berasal dari perusahaan dan 70% merupakan pendanaan dari perbankan.

"Perusahaan akan memberikan *bridging* [pinjaman sementara] sebesar Rp720 miliar," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk 70% pendanaan lainnya, perusahaan juga tengah mengajukan skema pembiayaan di luar pinjaman bank lokal.

"Kami juga lagi mengkaji pinjaman dari penjaminan infrastruktur baik SMI [PT Sarana Multi Infrastruktur] atau PII [PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia], bank asing, atau juga obligasi perusahaan untuk mencari yang paling menguntungkan," ucapnya.

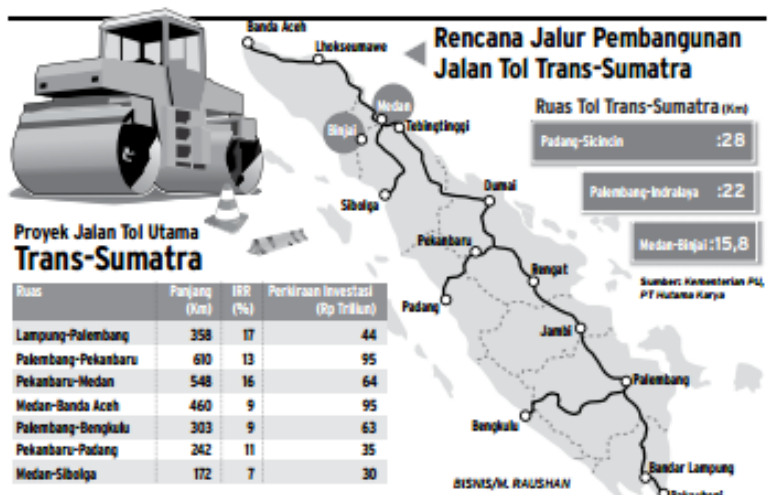
Ari menjelaskan Hutama Karya menargetkan *ground breaking* ruas tol Medan-Binjai dapat dilakukan pada akhir semester I/2013.

Menurutnya, ruas tersebut paling siap untuk dieksekusi karena trase tol yang direncanakan melewati lahan yang dimiliki PTPN, yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

"Karena area yang dilewati milik PTPN yang juga difasilitasi

► **Hutama Karya kuasai saham mayoritas.**

► **Target ground breaking akhir semester I/2013.**



oleh BUMN, sehingga pembebasan tanahnya pun jadi cepat, selain itu UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga mendukung hal tersebut," tuturnya.

#### RUAS LAIN

Selain itu, dukungan dari kecepatan pembebasan tanah, sudah keluarnya hasil studi kelayakan, jalannya desain, dan survei lapangan oleh tim yang dikerahkan perusahaan menjadi faktor lainnya mengapa ruas Medan-Binjai paling siap untuk dibangun.

Lebih lanjut, Ari mengatakan selain ruas Medan-Binjai, perusahaan juga menyiapkan opsi ruas lain yang akan dibangun tahun ini yakni Palembang-Indralaya, Babakan-Jati Agung, dan Batam.

Dia menjelaskan perusahaan harus melakukan persiapan yang lebih juga menentukan ruas mana yang menjadi prioritas.

"Kami akan melihat ruas mana yang paling memungkinkan untuk dibangun sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada sejalan dengan persiapan pembentukan anak usaha untuk masing-masing ruas nantinya," tuturnya.

Seperti diketahui, Hutama Karya mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 2.700 km bernilai Rp360 triliun.

Meskipun perusahaan sudah melakukan banyak persiapan, sayangnya hingga kini payung hukum yang dijanjikan pemerintah dari awal tahun ini tak kunjung terbit. □





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☒ Indopos
- ☐ Lain-lain, .....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Dahlan Siapkan Pertamina	<div><div>- Pemerintah saat ini masih melakukan kajian terkait pengelolaan blok migas yang terletak di Kalimantan Timur itu</div><div>- Hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya 4 tahun lagi ini</div></div>					

Dahlan Siapkan Pertamina

Agar Bisa Kelola Blok Mahakam 100 Persen

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tetap berkeyakinan PT Pertamina (Persero) dapat mengelola sepenuhnya Blok Mahakam. Untuk itu, Dahlan tengah mempersiapkan Pertamina. "Saya siapkan Pertamina untuk bisa 100 persen menerima penugasan Blok Mahakam, tapi keputusannya berada di pemerintah," ucap Dahlan pada acara Agrinex 2013, Jakarta, Jumat (5/4).

Saat ditanya apa saja yang dipersiapkan agar Pertamina bisa mengelola Blok Mahakam, pria yang kerap mengenakan sepatu kets ini masih merahasiakannya. Mantan bos PLN ini juga tidak memperlmasalahakan bila nantinya dua investor terdahulu di Blok Mahakam, yakni PT Total dan Inpex akan bergabung kembali menanamkan kontrak di Blok Mahakam. "Kalau memang keputusan pemerintah begitu, ya tidak apa-apa. Tapi kan belum diputuskan, karena masih akan didiskusikan lebih dulu oleh Pak Jero dan Pertamina," terangnya.

Meski begitu, Dahlan tetap optimistis bahwa Pertamina dapat mengelolanya. "Pasti (Pertamina) bisa kelola, walaupun usia Blok Mahakam sudah hampir 50 tahun dengan investasi yang nantinya akan dikeluarkan



BLOK MAHAKAM: Menteri BUMN Dahlan Iskan optimistis Pertamina dapat mengelolanya.

Pertamina," tutup Dahlan.

Seperti diketahui, kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pada 1967 dan kemudian diperpanjang pada 1997 untuk jangka waktu 20 tahun hingga 2017. Saat ini, Blok Mahakam dikelola Total Prancis dan Inpex Jepang.

Pemerintah saat ini masih melakukan kajian terkait pengelolaan blok migas yang terletak di Kalimantan Timur itu. Hingga saat ini be-

Dikatakan, pihaknya masih menunggu paparan Pertamina terkait kelanjutan Blok Mahakam. "Makannya itu, saya mau dengar dulu dari Pertamina bagaimana tanggung jawabnya mereka kalau seandainya nanti dikasih 100 persen mengelola itu. Sanggup gak mereka?" kata Jero.

Pertamina, imbuh Jero, harus mampu mempertanggungjawabkan ucapannya jika memang merasa mampu mengelola Blok Mahakam secara keseluruhan. "Kalau mereka bilang yakin 100 persen, mereka harus jamin produksi tidak akan turun," tegasnya.

Jero menilai putusan Blok Mahakam ini tidaklah terlalu gawat untuk saat ini. "Ya nanti, pokoknya setelah Pertamina paparkan ke Pak Dahlan dan ke saya. Nanti saya dan Pak Dahlan baru akan berunding. Ini kan enggak terlalu gawat, tapi setiap saat kita bahas," pungkas Jero.

Indonesia Resources Studies (IRESS) mendukung Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dengan terbuka menyatakan bahwa Pertamina mampu mengelola blok Mahakam 100 persen segera setelah kontrak dengan Total dan Inpex berakhir. "Oleh sebab itu, kami meminta Presiden SBY untuk segera memutuskan dan membuat pernyataan resmi bahwa sejak 2017 Pemerintah Indonesia akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada perusahaan milik negara, Pertamina," kata Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara di Jakarta (4/4). (chi/jpn)